

REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan RI.2009. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2009*, Jakarta.
- _____.2010. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2010*, Jakarta.
- _____.2011. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014*, Jakarta.
- _____.2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2011*, Jakarta.
- _____.2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015*, Jakarta.
- Behn, B.K., Carcello, J.V., Hermanson, D.R., & Hermanson, R.H. 1997. The Determinants of Audit Client Satisfaction among Clients of Big 6 Firms. *Accounting Horizons*, 11 (1): 7-24.
- Creswell, J.W. 2010. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Dialihbahasakan oleh Achmad Fawaid, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, edisi revisi Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- DeAngelo, L.E. 1981. Auditor size and Audit Quality. *Journal off Accounting and Economics*, Vol. 3, No.2, pp. 183-99.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuntadi, C. 2009. “Peningkatan Kapabilitas Auditor Internal dalam Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan”. *Majalah Dwiwulanan BPK RI*, No. 118/Edisi Agustus-September 2009/Tahun XXVII, ISSN 0216-8154.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Kabupaten Klaten*.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang *Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang *Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.09/2015 tentang *Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang *Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2012 tentang *Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang *Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.

Ritonga, I.T. 2010. *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta.

Suara Merdeka. 2015. "Pemkab Gagal Meraih Opini WTP". <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pemkab-gagal-meraih-opini-wtp/>, diakses tanggal 11 Januari 2016.

Syarifudin, A. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi

empiris pada Pemkab Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis*, Volume 14 No. 02, bulan Desember 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

Windarsih, D. 2015. Hubungan Kualitas Reviu Laporan Keuangan dengan Temuan Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY. *Tesis tidak diterbitkan*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.